

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan keadaan ekonomi stabil yang dapat membantu memperlancar usaha pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Kondisi ekonomi yang stabil juga memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi rencana pembangunan. Dengan kondisi perekonomian yang stabil ini diharapkan agar perhitungan-perhitungan dalam perencanaan tidak akan mengalami banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam memacu perkembangan kegiatan perekonomian Indonesia, fungsi dan peranan perbankan dewasa ini semakin menduduki tempat penting, hal ini disebabkan oleh karena perbankan merupakan penopang hampir seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi baik dibidang industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang–Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998).

Tugas pokok perbankan Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna

meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya berazaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, maka usaha bank salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam aktivitas pemberian kredit kepada masyarakat, maka bank akan memperoleh bunga, komisi atau provisi, sebagai pendapatan bank. Dengan demikian bank tentunya akan berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Kredit adalah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit mengandung unsur kepercayaan dan unsur waktu. Kepercayaan disini maksudnya adalah adanya kepercayaan dari pemberi kredit (bank) kepada pihak penerima kredit (debitur) akan kemampuan debitur dalam memenuhi janji untuk membayar hutangnya. Sedangkan unsur waktu disini maksudnya adalah adanya janji debitur untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak kreditur selalu mempunyai resiko adanya piutang tak tertagih atau kredit macet. Untuk menghindari tingginya jumlah piutang tak tertagih atau kredit macet diperlukan adanya sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan.

Dalam upaya penyaluran kredit usaha suatu lembaga perbankan perlu mempunyai prosedur sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit sangat membantu pihak perbankan dalam menghindari resiko piutang tak tertagih atau kredit macet secara dini. Adapun sistem pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit tidak hanya tergantung pada sedikit banyaknya tahapan yang dilalui oleh calon debitur, akan tetapi lebih kepada apakah tahapan yang harus dilalui tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik adalah struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara tepat, sistem otorisasi yang tepat dan prosedur pencatatan yang memadai dan dapat memberikan pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

PD. BPR Rokan Hulu adalah salah satu lembaga keuangan bank yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu yang saham sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan kabupaten Rokan Hulu. Dasar pendirian PD. BPR Rokan Hulu adalah Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 03 tahun 2007 tentang pendirian PD. BPR Rokan Hulu serta Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/33/KEP.GBI/DP9/2007, tentang Izin Operasional Bank PD. BPR Rokan Hulu.

PD. BPR Rokan Hulu telah berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mewujudkan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan PD. BPR Rokan Hulu sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PD. BPR Rokan Hulu memiliki prosedur dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, yang harus diikuti dalam mengajukan kredit selain itu dalam proses penyaluran kredit juga perlu dilakukan analisis terhadap pengajuan kredit oleh setiap calon nasabah atau peminjam. Hal ini tentunya dapat mencegah atau mengurangi jumlah piutang tak tertagih atau kredit macet pada PD. BPR Rokan Hulu.

Kolektibilitas kredit menurut surat edaran Bank Indonesia nomor: 29/12/BPPP/2004 ada lima kriteria, kolektibilitas kredit yaitu: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berikut ini adalah daftar posisi kredit pada tahun 2013 - 2015.

Tabel 1.1
Daftar Posisi Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu
Per 31 Desember 2013 - 2015

Kolektibilitas	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Lancar	19.750.602.000	20.024.486.000	22.593.345.000
Kurang Lancar	441.604.000	505.471.000	156.371.000
Diragukan	936.940.000	288.751.000	631.461.000
Macet	1.025.629.000	1.490.704.000	2.089.042.000
Total	22.154.775.000	22.309.412.000	25.470.219.000

Sumber : PD. BPR Rokan Hulu, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa adanya potensi untuk terjadinya kredit macet pada PD. BPR Rokan Hulu pada tahun 2015, salah satu penyebabnya pengendalian kredit kurang maksimal dan efektif dikarenakan adanya rekom

dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Penyaluran Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu telah diterapkan secara efektif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit pada PD. BPR Rokan Hulu telah diterapkan secara efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang sistem pengendalian intern penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama di masa yang akan datang.

- c. Wacana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Terkait dengan luasnya ruang lingkup dan permasalahan serta keterbatasan waktu dalam penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit, maka penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan prosedur penyaluran kredit dan penerapan sistem pengendalian intern dalam proses penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu periode 2013 - 2015.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Budiyati (2008) yang meneliti tentang “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali”. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif. Hal ini didasarkan pada sudah terdapatnya unsur-unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Dan hasil pengujian kepatuhan atribut terhadap sampel dengan tingkat keandalan sebesar 95%, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan dan nilai *Achieved Upper Precision Limit* (AUPL) sama dengan nilai *Desired Upper Precision Limit* (DUPL) yaitu sebesar 5% yang berarti sistem pengendalian intern yang ada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali dikatakan sudah efektif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada tahun pengamatan, dan objek penelitiannya.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari PD. BPR Rokan Hulu, sehingga terhindar dari unsur plagiat atau penciplakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan pembahasan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian yang relevan atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PD. BPR Rokan Hulu, analisis data, mencakup analisis sistem penyaluran kredit, analisis terhadap sistem pengendalian intern penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengendalian intern diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008 : 31) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008 : 163) sistem pengendalian intern adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern akuntansi

yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Winarno (2006 : 114) menyebutkan, “pengendalian intern adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen”.

2.1.3. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern menurut Winarno (2006 : 116) adalah sebagai berikut:

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dapat berupa kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud. Kekayaan perusahaan sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Bangunan, peralatan, mesin-mesin, semuanya bernilai sangat material dari segi keuangan dan sangat diperlukan dalam segi teknis operasional.

2. Meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Informasi menjadi dasar pembuatan keputusan. Apabila informasi salah, keputusan yang diambil baik oleh manajemen maupun pihak lain dapat salah, keputusan yang salah akan sangat merugikan perusahaan. Agar informasi tidak salah, perlu dilakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang dimiliki perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan. Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara besarnya pengorbanan dengan hasil yang diperoleh.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen secara berskala, manajemen telah menetapkan tujuan yang akan dicapai perusahaan dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila semua pihak didalam perusahaan bekerja sama dengan baik.

2.1.4. Komponen Pengendalian Intern

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dalam Anatasia (2011 : 83) sistem pengendalian intern memiliki lima komponen utama sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menegaskan bahwa integritas merupakan nilai suatu organisasi dan bahwa aktivitas tidak etis tidak dapat ditoleransi.

Faktor yang mencakup lingkungan pengendalian:

- Integritas dan nilai etika organisasi

- Komitmen terhadap kompetensi
- Komite audit dan dewan direksi
- Filosofi dan gaya hidup operasi manajemen
- Struktur organisasi
- Pemberian wewenang
- Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

b. Penilaian Resiko

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan dan harus menentukan bagaimana mengelola resiko tersebut.

c. Aktivitas Pengendalian

Untuk mengurangi terjadinya penyelewengan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk menghadapi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan.

d. Informasi dan komunikasi

Sistem pengendalian intern harus mengomunikasikan semua informasi penting ke semua lapisan dalam organisasi, baik ke bawah maupun ke atas, serta mengomunikasikan informasi ke pihak ekstern yang sesuai.

e. Pengawasan atau pemantauan

Sistem pengendalian intern harus memonitor secara periodik dengan memadai. Penyimpangan yang signifikan harus dilaporkan kepada manajemen puncak atau dewan komisaris.

2.2. Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu (Kasmir, 2012 : 81).

Menurut Budisantoso (2014 : 145) Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman nontunai.

2.2.2. Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kredit. Dalam prakteknya kredit yang ada dalam masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan fasilitas pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pembagian jenis kredit ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit menurut Ismail (2010 : 190) dibedakan menjadi:

1. Kredit Pengusaha Kecil dilihat dari kegunaannya yaitu :

a) Kredit Investasi

Merupakan kredit yang di berikan dengan tujuan untuk mengadakan barang-barang modal atau rangka investasi perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang modal kerja yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan.

1. Kredit dilihat dari segi tujuannya :

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi.

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang perdagangan.

2. Kredit dilihat dari jangka waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

3. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

2.2.3. Unsur – Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit berdasar Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008), adalah:

1. Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

3. Kesepakatan

Adanya kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Dimana kesepakatan ini di buat dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas sesuai dengan kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

4. Resiko

Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau menjadi kredit macet. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya. Demikian pula sebaliknya, resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain.

5. Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.4. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaian, dan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisa 5C (Kasmir, 2012 : 101), yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang (calon debitur). Maksudnya orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaannya maupun bersifat pribadi (Kasmir, 2012 : 101).

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Serta kemampuannya dalam mengelola bisnis tersebut. Pada akhirnya akan dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan (Kasmir, 2012 : 102).

Penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

3. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah (modal) terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank (Kasmir, 2012 : 102).

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan (Kasmir, 2012 : 102).

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing (Kasmir, 2012 : 102).

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula di analisis paling sedikit selama jangka waktu kredit.

2.2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2009 : 100-103):

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat.
8. Untuk meningkatkan hubungan nasional.

2.2.6. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

Secara umum proses pemberian kredit menurut Kasmir, (2012 : 106) adalah sebagai berikut:

a. Pengkajian berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan kredit

Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

g. Menandatangani akad kredit atau perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kreditnya, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

h. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana.

Tinggi rendahnya penyaluran produk dan jasa yang dimiliki suatu bank yang tidak terlepas dari cara karyawan tersebut mempromosikan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada nasabahnya.

2.2.7. Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit

Menurut Mulyono sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, dalam usahanya untuk menjaga kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan keuangan yang andal (Budiyati : 2008).

a. Tahap Prakarsa dan Analisa Kredit

Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dan sesuai dengan jenis kreditnya sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Identitas pemohon, informarmasi mengenai identitas dimaksudkan untuk melihat gambaran awal penanggung jawab utama.

- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup jumlah kredit, objek yang dibiayai, jangka waktu kredit dan mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup saat mulai bidang hubungan bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.
- d. Analisis 5C kredit, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis prospek usaha, dan analisis angunan kredit.

b. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pejabat pemutus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. Berdasarkan analisa dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pejabat rekomendasi, pejabat pemutus memberikan keputusan atas paket kredit tersebut, dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir putusan kredit, dan selanjutnya paket kredit diserahkan kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan surat penawaran putusan kredit kepada pemohon yang memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Apabila pemohon menyetujui persyaratan dan ketentuan tersebut maka pemohon harus menandatangani surat putusan tersebut diatas materai dan mengembalikan ke bank.
2. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
3. Mempersiapkan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian mendukung menjamin perjanjian pokoknya.
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan.

2.2.8. Penyelesaian dan Penyelamatan kredit

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang dilakukannya adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya yang dihadapi oleh debitur.

Menurut Kasmir (2012 : 120) penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Resceduling

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. Reconditioning

Merupakan bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit.

c. Restructuring

Yaitu peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, baik moral dalam arti dana untuk keperluan modal bekerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya).

d. Kombinasi

Yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan kombinasi antara alternatif penyelamat diatas.

e. Likuiditas

Yaitu penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Budiyati (2008) meneliti “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali ”. hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif. Hal ini didasarkan pada sudah terdapatnya unsur-unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Dan hasil pengujian kepatuhan atribut terhadap sampel dengan tingkat keandalan sebesar 95%, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan dan nilai *Achieved Upper Precision Limit* (AUPL) sama dengan nilai *Desired Upper Precision Limit* (DUPL) yaitu sebesar 5% yang berarti sistem pengendalian intern yang ada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali dikatakan sudah efektif.
2. Siti Maunah (2010) Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga meneliti tentang analisis pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam Gradiska Candirejo hasil penelitiannya adalah dengan adanya kepercayaan

dari masyarakat pihak koperasi simpan pinjam (KSP) bisa menyediakan dana bagi anggotanya untuk keperluan kredit. Terbukti mulai dari berdiri sampai 31 Mei 2010 kemarin koperasi simpan pinjam (KSP) Gradiska memiliki 4.264 anggota yang terdiri dari 60% penabung dan 40% peminjam. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam (KSP) Gradiska telah berhasil karena angka kredit macet mencapai 3% dengan jumlah 51 orang. Sedangkan untuk pembiayaan kurang lancar 68 orang, pembiayaan potensial bermasalah 171 orang dan pembiayaan lancar mencapai 1.416 orang.

3. Pirdaus (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian Pirdaus bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit. Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit didominasi direktur dalam menentukan jumlah calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi berupa kuitansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikatakan sudah efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Pasir Pengaraian yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern Kampung Padang Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi dari suatu objek penelitian, (Maunah, 2010 : 9). Penelitian ini dilakukan pada PD. BPR Rokan Hulu tahun 2015.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah kuesioner yang diberikan kepada responden yang relevan dengan penelitian ini, yaitu kuesioner yang diberikan pada bagian kepala seksi kredit, *customer service* kredit, analisa kredit, administrasi kredit, remedial kredit, penagihan kredit dan *teller*.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari perusahaan, yaitu terdiri dari struktur organisasi, SOP perkreditan dan daftar kolektibilitas kredit tahun 2013-2015.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

1. Kuesioner

Adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yang terkait dengan penyaluran kredit di PD. BPR Rokan Hulu. Penulis menyediakan jawaban secara “*close ended questioner*” atau kuesioner secara tertutup, yaitu responden hanya memberi tiga alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis yaitu “Ya”, “Tidak” atau ”Tidak Relevan”. Sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut.

2. Dokumentasi

Adalah dengan cara meminta dokumen seperti struktur organisasi, SOP perkreditan, memorandum usulan kredit, dan laporan analisa jaminan.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah kuesioner terkumpulkan seluruhnya penulis melakukan analisis dengan cara :

1. Menghitung hasil jawaban kuesioner
2. Menghitung hasil jawaban dengan menggunakan rumusan Champion dalam Amirah Ahmad (2013 : 40), yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

3. Menginterpretasikan hasil perhitungan kedalam persentase sebagai berikut :
 1. 0% - 25% = penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 2. 26% - 50% = Penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 3. 51% - 75% = Penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 4. 76% - 100% = Penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.

3.6. Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian agar penelitian dapat terlaksanakan sesuai dengan batas yang telah di tetapkan :

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis kegiatan	Tahun 2016					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Judul dan Pengumpulan Data	■					
2	Penyelesaian Proposal dan Seminar Proposal		■	■			
3	Penyelesaian Skripsi dan Seminar Skripsi				■	■	■